

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda adalah salah satu aset negara. Maju hingga mundurnya suatu Negara bergantung pada para pemudanya yang berperan sebagai agen perubahan. (Ningtyas et al., 2019) mendefinisikan pemuda merupakan suatu individu yang memiliki jiwa yang dinamis, yang memiliki semangat, gejolak dan optimisme yang tinggi dan masih belum bisa mengendalikan emosi di dalam dirinya.

Seorang pemuda tidak akan mampu melakukan perubahan dunia apabila potensi yang dimiliki tidak dapat tersalurkan dengan baik. Dalam hal ini pemberdayaan pemuda sangat berperan penting dalam mengolah dan mengembangkan potensi para pemuda. Generasi muda ialah bibit unggul di masa depan yang diyakini mampu meningkatkan mutu SDM dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Dalam pemberdayaan pemuda, otoritas publik memainkan peran penting. Dengan begitu banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap otoritas publik, baik otoritas publik di tengah atau di daerah dan terutama para pemuda yang akan berubah menjadi pengganti negara.

Dewasa ini, Indonesia sedang dihadapkan dengan tantangan lebih besar terkait pembangunan karakter dan jati diri para pemuda. Semakin meningkatnya persaingan pemuda dalam menghadapi bonus demografi 2020-2035. Penting untuk memiliki ruang yang luas bagi remaja untuk

mengambil bagian yang berfungsi yang dikembangkan dalam setiap aspek kegiatan publik dalam mengembangkan jiwa ujung kepeloporan.

Berikut adalah tabel jumlah pemuda di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 yang bersumber dari BPS Kabupaten Rembang :

Tabel 1 1 Jumlah Pemuda di Kabupaten Rembang Tahun 2020

Golongan Umur	Jumlah Penduduk
10-14	49.051
15-19	50.519
20-24	53.646
Total	153.216

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah pemuda di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 cukup banyak yakni 153.216 pemuda. Apabila seluruh pemuda di Kabupaten Rembang ini diberdayakan tentunya dapat membantu dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Rembang.

Dalam pemberdayaan pemuda, peran seorang pemerintah sangat dibutuhkan sekali dalam upaya mendapatkan kader penerus bangsa dan Negara dalam rangka pembangunan nasional nantinya. Dalam hal ini pemberian fasilitas dapat diupayakan dalam bentuk pelatihan ketrampilan kepemudaan, *leadership training*, dan penanaman jiwa patriotisme yang tinggi serta ilmu mengenai budi pekerti sebagai bekal para pemuda dalam rangka mencapai tujuan nantinya.

Disini Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang sebagai pemberdaya generasi muda mulai memfasilitasi pemuda dengan berperan sebagai wadah pengembangan komunitas organisasi melalui kegiatan pekan temu pemuda Kabupaten Rembang, melalui kegiatan ini akan dimulai untuk membangun strategi kepemudaan yang ada di Rembang.

Bidang Kepemudaan memiliki tugas dalam melakukan penyiapan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan secara konsisten berkenaan dengan pembinaan pemuda, pemberdayaan pemuda, pelaksanaan penyadaran dan pengembangan generasi muda, dan kegiatan pemuda pelopor di wilayah kabupaten, *mentoring* kewirausahaan, pemuda kader serta adanya pengembangan organisasi kepemudaan di kabupaten.

Sebagai generasi penerus bangsa, seorang pemuda baik siswa maupun mahasiswa harus siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang sebagai perwujudan tujuan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu perlu adanya persiapan yang maksimal dan secara matang. Pembedayaan pemuda ini dapat diupayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag Kabupaten Rembang melalui berbagai program kerja kepemudaan yang mampu meningkatkan inovasi dan kreatifitas dari seorang pemuda di Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, setiap anak muda yang mendominasi berhak mendapat penghargaan. Banyak anak muda Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan prestasi yang membanggakan baik di tingkat publik maupun global. Untuk situasi ini, Dinas

Pendidikan dan Olahraga Pemuda memiliki program kerja untuk memilih pemuda yang berperan, inovatif dan kreatif dalam menyelidiki dan mengembangkan kapasitas terpendam mereka dan membuat lompatan ke depan baru yang bermanfaat bagi daerah setempat. Program ini merupakan program pemuda perintis di bawah lindungan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Program Pemuda Pelopor ini dalam pelaksanaan kompetisinya memiliki beberapa tingkatan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten. Dari program ini sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan pemuda maupun masyarakat untuk terus bergerak dan berinovasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu menciptakan karya nyata yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dari hasil karya tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merekrut pemuda yang sudah memiliki kemampuan di bidang pangan, sosial budaya, pendidikan, pengelolaan SDA, dan tekhnologi.

Dindikpora mengembangkan Program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemuda di bidang : a) Pendidikan, b) Agama, c) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, d) Pangan dan e) Inovasi Tekhnologi. Selain itu Dindikpora juga ingin mengembangkan potensi kepeloporan pemuda dalam berbagai bidang berbasis isu strategis dan sumber daya lokal.

Kepeloporan pemuda sangat dibutuhkan untuk melakukan terobosan baru dan menjadi pemuda yang mampu memecahkan berbagai permasalahan

terkait penguatan *nation and character building* dan mengatasi permasalahan sosial kepemudaan yang lain. Sehingga diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan ide kreatif dan inovatif.

Dalam upaya pencapaian tujuan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang, beberapa upaya yang dilakukan oleh Dindikpora Kabupaten Rembang diantaranya :

a. Bidang Pendidikan

Hadirnya PKBM, pembelajaran peningkatan diri, baik formal maupun nonformal. Subbidang pembinaan merupakan kekhasan kegiatan rintisan pemuda yang langsung dimanfaatkan oleh daerah setempat dan dihargai oleh berbagai kalangan dan pemerintah lingkungan sebagai bidang pelatihan yang akan diusulkan dalam pemilihan pelopor pemuda.

b. Bidang sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara

(1) Sektor Sosial: Penanggulangan bencana, layanan kesejahteraan sosial, kerja sukarela dan inisiatif kemanusiaan lainnya; (2) Bidang Kebudayaan: berupa pemusik, penari, seniman dan aktor dengan mengedepankan ciri khas dan kearifan lokal untuk menjaga keragaman dan membanggakan budaya bangsa; (3) Bidang Pariwisata: potensi suatu daerah atau kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengutamakan potensi sumber daya alam

sebagai daya tarik wisata di tingkat Kabupaten dan Provinsi; (4) Bela Negara : cinta tanah air dan kesadaran bernegara melalui kegiatan memelihara kerukunan masyarakat, penanganan konflik dalam menjaga keamanan, memelihara perdamaian dalam berdaulat negara dan bangsa.

Melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga pemerintah memberi penghargaan untuk para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan yang telah mampu menunjukkan eksistensi dan semangatnya dalam mengembangkan potensi diri, membuat terobosan baru, dan menjadi pemuda yang solutif. Program pemilihan Pemuda Pelopor memiliki beberapa tujuan yakni :

- a. Menghidupkan jiwa ujung tombak di kalangan anak muda
- b. Menemukan dan mempersepsikan pemuda yang memiliki potensi sebagai ujung tombak
- c. Mengakui kaum muda yang siap menjadi ujung tombak jalanan, memberikan jawaban atas berbagai persoalan
- d. Pemberian penghargaan kepada generasi muda yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pelopor Pemuda Tingkat Nasional

Program Pemuda Pelopor ini dapat dikatakan cukup berhasil karena dapat mencapai tujuan dari program ini. Salah satunya yaitu kemampuan Dindikpora dalam mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, memberikan jalan keluar atas berbagai masalah, hal ini dibuktikan dengan peran salah satu

pemenang pemuda pelopor pada tahun 2019 yaitu Romi Adi yang berhasil dalam melakukan pendampingan desa wisata sehingga desa wisata tersebut dapat menjadi tempat wisata yang maju dan memberikan pemasukan yang cukup besar pada sektor pariwisata di Kabupaten Rembang.

Berikut adalah dokumentasi pemenang program Pemuda Pelopor di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 :

Gambar 1 1 Pemenang Pemuda Pelopor Tahun 2019



Sumber : Google.com

Romi Adi bermitra bersama paguyuban Ikatan Mas Mbak Rembang untuk melakukan usaha pembangunan untuk membangun pasar tradisional dan desa guna mengurangi angka kemiskinan di wilayah setempat. Hal ini terbukti di Pasar Mbrumbung dimana yang sebelumnya Pasar Mbrumbung termasuk desa miskin, setelah dibangun tempat wisata kini Pasar Mbrumbung mampu menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut dengan pemasukan yang

semakin hari semakin naik hingga saat ini dapat mencapai 100.000.000 per tahun.

Dalam pelaksanaan program pemuda pelopor ini tentunya terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah masih rendahnya pemahaman peserta terkait bidang yang mereka pilih, sehingga hal tersebut menyebabkan peserta sulit untuk lolos atau lanjut ke tingkat Provinsi bahkan Nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas dari program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang dengan mengangkat judul **“Evaluasi Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang?
3. Apa peran pemuda pelopor dalam pengembangan Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui evaluasi pelaksanaan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang.
3. Mengetahui peran pemuda pelopor dalam pengembangan Kabupaten Rembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan teori – teori ilmu pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum dapat dikembangkan serta berperan sebagai sumbangsih dalam pengaplikasian Ilmu Administrasi Publik dan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program pemuda pelopor.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan mampu berperan sebagai perwujudan dari teori yang telah di dapat penulis selama di bangku kuliah dan mampu meningkatkan wawasan mengenai pemberdayaan pemuda dan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang.

b. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambah koleksi dan sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya yang meneliti terkait Evaluasi Program Pemuda Pelopor.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Program Pemuda Pelopor di Kabupaten Rembang.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan menambah informasi yang berguna bagi masyarakat khususnya para pemuda terkait program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang beserta proses pemilihan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti program tersebut.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu :

Tabel 1 2 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	TUJUAN	HASIL PENELITIAN
1.	Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pelopor Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor (2018).	Rita Rahmawati, dkk.	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengajak generasi muda untuk ikut ambil peran guna membantu negeri ini dalam pencarian jati dirinya. Peran penting pemuda sangat dibutuhkan sebagai pelopor kesadaran berbangsa dan bernegara demi eksistensi Indonesia dan demi kehidupan	Faktor-faktor yang dianggap berperan penting dalam pelaksanaan program pemuda perintis di Kota Bogor adalah faktor pendaftaran anggota, variabel pelaksanaan kelompok binaan, dan faktor pelaksanaan penilaian. Pendaftaran anggota dalam program pemuda perintis di Kota Bogor belum bertambah, mengingat inspirasi pemuda di Kota Bogor untuk mengikuti program pemuda perintis masih belum signifikan, hal ini karena cara hidup masyarakat Bogor dimana mereka lebih dinamis di luar

			bernegara yang lebih baik sehingga Indonesia layak untuk dapat dikatakan sebagai bangsa yang bermartabat.	kota Bogor, seperti bekerja atau berkonsentrasi di Bogor, Jakarta, Bandung atau luar daerah perkotaan yang berbeda. Selain itu, pelaksana sebenarnya menggunakan teknik tradisional dalam mengarahkan proses pendaftaran anggota program, untuk sosialisasi program mereka belum memanfaatkan media yang tersedia secara efektif untuk kaum muda.
2.	<i>Analysis Pioneering Youth Development Program In The Ministry Of Youth And Sports (2010).</i>	Alfa Saputra	Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Kemenpora RI dalam mengembangkan kepeloporan pemuda.	Program kepeloporan pemuda di Kemenpora RI belum berjalan baik dan proses pengembangan program juga berjalan belum sebagaimana mestinya. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Kemenpora dalam rangka memperbaiki program kepeloporan pemuda diantaranya dengan redefinisi makna kepeloporan, menata kembali prioritas dalam menentukan target program,

				menjadikan program pelatihan kepeloporan pemuda sebagai <i>mainstream</i> dan mempernaiki komunikasi dengan <i>stakeholders</i> kepemudaan.
3.	Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Studi Di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi). (2019)	Esty Purnama Sari	Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam program pengembangan kewirausahaan pemuda di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, kendala apa saja yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh dinas terkait, serta mengetahui evaluasi dari kebijakan program	Kebijakan dalam program pengembangan kewirausahaan pemuda adalah dengan pendidikan, pelatihan, magang, bimbingan dan pendampingan. Kendala yang dialami adalah masih kurangnya minat pemuda untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan. Karena terbatasnya anggaran yang tersedia yang membuat program pengembangan KWU tidak lagi dilaksanakan pada tahun 2019. Evaluasi terhadap kebijakan program pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

			pengembangan kewirausahaan pemuda di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.	Jambi di Kota Jambi ini dapat dikatakan sudah maksimal, yang dievaluasi adalah memberikan wewenang kepada dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota untuk melaksanakan program dan perbaikan sistem perekrutan peserta pelatihan.
4.	Evaluasi Program Pelatihan Pemuda Dalam Meningkatkan Sdm Di Hmi Koordinator Komisariat Unm. (2016)	Andi Hasdiansyah & Yoyon Suryono	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pelatihan pemuda dalam meningkatkan SDM di HMI komisariat UNM, selain itu untuk dapat mengevaluasi program tersebut peneliti juga menganalisis apa saja dampak, tujuan, hambatan program ini bagi pemuda di	Pelatihan memiliki efek positif karena membuat perubahan yang ideal, meskipun tidak sepenuhnya. Target pelatihan tercapai meski tidak sepenuhnya. Kemampuan hasil pelatihan telah berkembang namun belum memiliki pilihan untuk bertahan dalam jangka panjang. Info bagus tapi belum sepenuhnya ambil bagian dalam pelatihan unit. Hambatan untuk pelatihan adalah biaya dan tidak adanya disiplin antara moderator dan siswa. Memperkuat ujian Islam, membatasi organisasi,

			Makassar dan merekomendasikan pengembangan model program basic training HMI Cabang Makassar bagi pemuda.	dan memperbaiki kekurangan proses.
5.	<i>Youth Empowerment Solutions: Evaluation of an After-School Program to Engage Middle School Students in Community Change. (2017).</i>	Marc A. Zimmerman	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program <i>Youth Empowerment Solutions</i> dalam melakukan pemberdayaan pemuda.	Pelatihan YPAR mencakup beberapa faktor yang terkait dengan hasil pemberdayaan, seperti pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja tim. YES memperluas penelitian tentang YPAR dengan berfokus pada hasil terkait PYD, memeriksa efek mediasi dari pemberdayaan, dan memasukkan kurikulum terstruktur yang memperluas fokus bagi pemuda di luar penelitian. YES dan YPAR memiliki pendekatan serupa untuk membantu pemuda mendapatkan suara dalam proses perubahan,

				termasuk penggunaan strategi photovoice, fokus pada dewasaisme, dan kerja kolaboratif pada proyek perubahan komunitas.
6.	Evaluasi Program Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan Pemuda Di Desa Jatisaba Tahun 2018.	M. Ayik Sugam	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam terkait pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda disporapar provinsi jawa tengah di desa Jatisaba, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas	Program PKKPP belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan dari sisi pelaksanaan, program PKKPP masih belum menysasar seluruh pemuda di desa. Hal ini terjadi karena tidak adanya struktur organisasi yang jelas yang menyebabkan SOP tidak bejalan maksimal di desa. Dari segi dampak, program ini tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian di perdesaan. Adanya afiliasi jaringan relasi antar aktor sejak pra rekrutmen hingga pelaksanaan program tidak memberikan dampak apapun kepada masyarakat dan pemerintah desa.
7.	Evaluasi	Rani Anggra	Penelitian ini	Program yang dibuat oleh

Program Gala Desa Tahun 2017 Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga. (2017).	Berta Yagusta.	bertujuan untuk mendeskripsikan program Gala Desa Tahun 2017 yang diselenggarakan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, yang bersinergi juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menarik untuk bergabung bersama dan memperkirakan pencapaian proyek dari otoritas publik untuk mendorong individu untuk mendapatkan kesempatan untuk berolahraga. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala, antara lain menggali potensi atau kemampuan yang berasal dari kota untuk diciptakan di tingkat publik dan global yang belum diakui sebagaimana yang diharapkan dan Target Program Gala Desa 2017 dalam latihan belum maksimal tercapai. Karena ada program yang tidak dijalankan selama ini di beberapa daerah.
--	----------------	--	--

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengimplementasian program kepeloporan pemuda masih banyak yang kurang efektif, sehingga evaluasi program yang tepat masih dibutuhkan dalam

rangka meningkatkan efektivitas program kegiatan agar kedepannya dapat lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peneliti untuk meneliti terkait Evaluasi Program Pemuda Pelopor.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka peneliti akan meneliti tentang “Evaluasi Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang” yang berfokus pada pelaksanaan dan evaluasi program Pemuda Pelopor di Kabupaten Rembang. Hal ini dilakukan karena peneliti belum menemukan penelitian dengan penggunaan fokus dan lokus yang sama sehingga ini merupakan hal yang baru dan belum diteliti oleh peneliti lain.

1.5.2 Administrasi

Menurut A. Dunsire dalam kutipan Keban (2014: 2) administrasi berarti arean di bidang kerja akademik yang merupakan sebuah pedoman dan arahan, berkaitan dengan pemerintahan dan menciptakan suatu prinsip dalam implementasi publik. Administrasi juga diartikan sebagai kegiatan analisis dalam pertimbangan pengambilan kebijakan.

Sedangkan Sondang P. Siagian (dalam Antonio, 2012:12) mendefinisikan administrasi adalah serangkaian proses teamwork yang dilakukan oleh 2 orang bahkan lebih untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan atas dasar rasionalitas. Berbeda dengan Sondang, White (dalam Sarna, 2017:2) berpendapat bahwasannya Administrasi merupakan upaya yang

dilakukan baik secara kelompok maupun individu yang dilakukan baik secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa administrasi sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok untuk melayani atau memenuhi keinginan masyarakat melalui pertimbangan – pertimbangan yang ada dengan bekerjasama bersama masyarakat maupun swasta dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada prakteknya, administrasi pada pemberdayaan pemuda melalui Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang ialah dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam melakukan pemberdayaan pemuda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang berperan sebagai fasilitator bagi pemuda di Kabupaten Rembang berupa program-program pemberdayaan salah satunya melalui program pemuda pelopor yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan pemuda agar dapat ikut serta dalam pembangunan Kabupaten Rembang, meningkatkan jiwa kepeloporan pada pemuda di Kabupaten Rembang serta memberikan apresiasi pada pemuda berprestasi di Kabupaten Rembang.

1.5.2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Rachman, 2019:5) Administrasi publik adalah pengorganisasian pelayanan publik yang dioordinasikan guna mengelola dan menjalankan berbagai macam keputusan dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Administrasi publik hadir dengan mengusung tujuan untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam lingkup publik yang berkaitan dengan kepentingan umum dan melakukan berbagai evaluasi di sektor organisasi SDM dan keuangan.

Keban (2014:3) memiliki pendapat lain, pendapat yang ia jelaskan lebih menggambarkan administrasi publik merupakan keotiteran pemerintah. Keban menjelaskan bahwasnnya administrasi publik merupakan ruang bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pemilik kebijakan, yang mana disini rakyat atau masyarakat hanya dianggap sebagai pelengkap semata. Ia berpandangan bahwa disini pemerintah merupakan agen tunggal yang berkuasa karena masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif dan tidak tau menau mengenai kebijakan yang tepat diambil dan harus menerima atau tunduk atas apa saja kebijakan ataupun peraturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Menurut George J. Gordon (dalam Nurmandi, 2010: 2) manajemen kebijakan dapat diakui secara keseluruhan siklus yang diselesaikan oleh dua asosiasi dan orang-orang dengan penerapan atau pelaksanaan undang-undang dan pedoman yang diberikan oleh dewan, ketua dan pengadilan. Sehubungan dengan pengaturan ini, saya katakan bahwa implementasi kebijakan adalah

suatu penyelidikan ilmu yang digunakan untuk mengurus masalah-masalah publik melalui kemajuan, dimana otoritas publik adalah penghibur dalam menawarkan jenis bantuan dan memberikan jabatan kepada daerah untuk mengelolanya. hidup sehingga nantinya individu dapat bebas tanpa bantuan. dengan otoritas publik.

Keberadaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai aktor untuk memecahkan masalah publik terkait dengan permasalahan pemberdayaan kepemudaan yang ada di Kabupaten Rembang. Dengan adanya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini pemberdayaan pemuda dapat ditangani dengan baik melalui program pemuda pelopor yang diadakan untuk meningkatkan keaktifan pemuda di Kabupaten Rembang.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Thomas S. Kuhn dalam kutipan (Ulya dan Abid, 2015:255) memiliki pendapat bahwa paradigmana adalah suatu cara pandang seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dianut pada suatu masa yang mana meliputi nilai-nilai, sebuah metode, dan sebuah prinsip yang mendasar.

Nicholas Henry, berpandangan bahwa di dalam administrasi publik terdapat enam paradigm yakni :

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1927).

Dalam tulisannya Frank J. Goodnow menjelaskan bahwa seorang pemerintah mempunyai 2 fungsi yang berbeda, yaitu:

a. Fungsi politik

Pada fungsi ini seorang pemerintah harus mampu memusatkan perhatiannya pada pembuat kebijakan/ekspresi dan kehendak rakyat.

b. Fungsi administrasi

Fungsi ini lebih berfokus apada implementasi kebijakan. Dalam menentukan tujuan dan rumusan kebijakan Badan legislative dan yudikatif saling bahu membahu. Sementara badan Eksekutif terpisah dan apolitis dalam pelaksanaan kebijakan. Paradigm ini hanya menekankan dari aspek luar saja yakni birokrasi pemerintahan dan kurang membahas mengenai metode yang harus di kembangkan daam administrasi publik.

2. Prinsip – prinsip Administrasi Negara (1927-1937).

Paradigma ini lebih menekankan prinsip administrasi publik sebagai sebuah focus administrasi publik yang mana prinsip tersebut yang biasa kita kenal sebagai POSDCORB. POSDCORB terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Coordinating, Directing, Reporting, Budgeting*. Dalam hal ini focus lebih ditekankan daripada lokus karena prinsip tersebut bersifat fleksibel dan dapat ditempatkan dimana saja termasuk pada organisasi pemerintahan.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970).

Pada paradigma ini dijelaskan bahwa administrasi publik selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu dan tidak bersifat universal. Dalam hal ini

terjadi perdebatan pendapat antara dua belah pihak. Namun, John Gaus hadir dan menegaskan bahwasannya teori administrasi publik sebenarnya teori politik. Akibatnya, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik. Namun pada dasarnya administrasi publik merupakan suatu seni dalam pengambilan keputusan yang bertujuan menjalin kerjasama bukan untuk menimbulkan sebuah konflik.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970).

Paradigma ini membahas mengenai arah perkembangan dari paradigma itu sendiri. Yang pertama berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi muni, dimana pada ilmu murni ini didukung oleh disiplin psikologi sosial. Yang kedua berorientasi pada kebijakan publik. Yang mana arah perkembangannya semuanya berfokus pada penerapan kebijakan dan untuk lokusnya sendiri tidak jelas.

5. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-Sekarang).

Di dalam paradigma ini diketahui fokus dan lokusnya sudah jelas. Untuk fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini berupa teori organisasi, manajemen dan kebijakan publik. Sementara untuk lokusnya berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dan berkaitan dengan berbagai kepentingan, urusan, dan kebijakan publik.

6. *Public Administration and Public Affair* (1990)

Paradigma keenam adalah paradigma terakhir dan berhubungan dengan pemerintah, selama paradigma ini persepsi pemerintah dan administrasi yang terjadi perubahan ini di catat dalam 3 (tiga) klarifikasi, yaitu:

- a. Globalisasi melibatkan penggabungan perusahaan multi nasional dan isu di seluruh dunia baik internet maupun perdagangan.
- b. Redefinisi, meliputi siklus nyata oleh otoritas publik untuk mengklasifikasi ulang posisi otoritas publik, otoritas publik bergerak dari kapasitas ke kerjasama dan asosiasi (untuk kembali ke pekerjaan pemerintah).
- c. Devolusi termasuk partisipasi warga negara kelompok negara perusahaan kemitraan swasta. Selama ini paradigma Administrasi Publik beralih dari mengendalikan warga, upaya penyediaan kebijakan publik, hukum, organisasi, dan lembaga antara pemerintah masyarakat, swasta, dan sektor nirlaba mulai kabur. Pemerintah di masa ini sedang merestrukturisasi organisasi dengan penggunaan teknologi informasi.

Sesuai dengan penelitian, maka paradigma yang diambil adalah paradigma kelima, yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Dimana dalam penelitian ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang menjadi aktor dalam proses pemberdayaan pemuda yang menjalankan fungsi – fungsi manajemen di dalam pelaksanaanya dan tidak

lepas dari adanya kebijakan yang efektif yang dibuat oleh pemerintah, sementara itu, dalam pelaksanaannya muncul masalah-masalah yang ada sebelum ataupun sesudah adanya penanganan pemberdayaan pemuda yang mengacu kepada kepentingan dan urusan publik.

1.5.3 Manajemen Publik

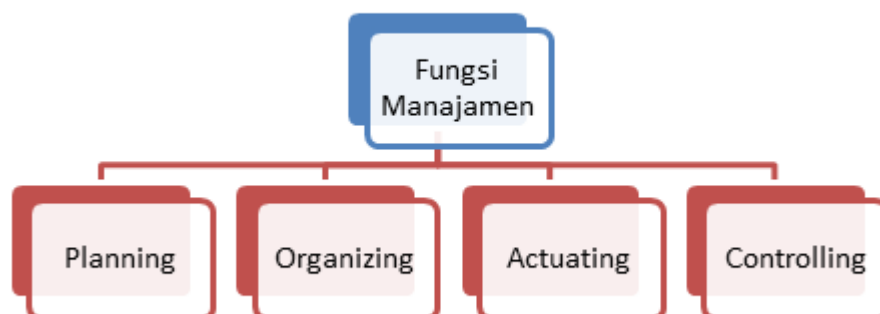
Istilah manajemen berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain (Keban, 2004). Keban menambahkan bahwa definisi tersebut mengindikasikan beberapa elemen penting dalam manajemen yaitu bahwa manajemen merupakan serangkaian proses kerja sama dan mengupayakan sinergisme, proses kerja sama tersebut terjadi diantara individu yang dipimpin oleh seorang pemimpin, proses kerja sama tersebut dijalankan atas dasar prinsip-prinsip yang telah teruji keterandalannya.

Manajemen publik merupakan suatu ilmu yang bersifat interdisipliner atau cabang dari sebuah disiplin ilmu, administrasi public menggabung beberapa aspek – aspek umum organisasi, yaitu fungsi manajemen seperti POAC di satu sisi dan fungsi organisasi public seperti sumber daya manusia, keuangan, informasi, politik di sisi lain (Keban, 2004). Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam Keban, 2004) menggambarkan manajemen public dalam ilmu administrasi public sebagai sistem jantung dan sirkulasi darah sedangkan kebijakan public sebagai sistem otak dan syaraf, hal ini berarti bahwa

manajemen public merupakan proses yang menggerakkan dan mengelola sumber daya atas perintah kebijakan.

Manajemen publik atau manajemen instansi pemerintahan sendiri dikenal sebagai salah satu bentuk manajemen yang bersifat khusus. Overman (dalam Keban, 2004) menjelaskan bahwa manajemen public merefleksikan tekanan antara *rational instrument* dan orientasi politik. Selain itu, manajemen public sendiri dijiwai nilai-nilai public dalam pelaksanaannya. Dwiyanto (2020) menjelaskan bahwa hubungan antara manajemen public dengan nilai-nilai public bersifat sirkuler dan simetris, artinya manajer public harus dapat menciptakan manajemen public harus memnuhi hak dan kewajiban warga Negara serta di sisi lain kewajiban dan prinsip pemerintahan harus menjadi dasar dalam menjalankan kebijakan dan program yang harus dikelola.

Berikut adalah bagan fungsi manajemen menurut George R. Terry (1958) :



Gambar 1 2 Fungsi Manajemen menurut George R. Terry (1958)

1. *Planning*

Merencanakan adalah rencana langkah-langkah yang metodis dan terorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan adalah tahap dasar dari siklus administrasi mengingat fakta bahwa pada tahap ini berbagai latihan diatur sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam menyusun ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengatur latihan apa yang akan dilakukan organisasi dan membuat rencana keuangan (rencana pengeluaran).

2. *Organizing*

Pengorganisasian adalah tindakan pembagian tugas untuk setiap aset dalam organisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing aset tersebut. Ada dua latihan yang dilakukan pada tahap sorting out, yaitu kepegawaian khusus dan menggabungkan semua aset organisasi. Penempatan staf adalah tindakan penting karena dalam gerakan ini, dewan menempatkan individu-individu yang ideal dalam posisi yang sempurna sehingga mereka dapat memastikan latihan selesai. Setelah menempatkan individu-individu yang sempurna pada posisi yang sempurna, para pionir perlu mengarahkan kemampuan maksimal dari aset-aset tersebut agar semuanya berjalan secara sinergis.

3. *Actuating*

Assembling adalah menggerakkan semua individu yang berkumpul untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Tahap ini terdiri dari wewenang dan

koordinasi, khususnya mengarahkan organisasi untuk memimpin setiap aset yang dapat diakses untuk bekerja seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga upaya bersama ini dapat dilakukan dalam kesepakatan. Hal ini dapat mencoba untuk tidak ada persaingan antar aset yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi.

4. *Controlling*

Mengontrol tidak hanya mengontrol pelaksanaan berbagai latihan yang diselesaikan, tetapi juga melakukan pembetulan dengan asumsi latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya dalam organisasi public yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi publik itu sendiri yaitu memberikan pelayanan kepada warganya. Oleh karena itu, manajemen publik menyeimbangkan fungsi manajemen secara umum seperti *planning, organizing, actuating, controlling* dan fungsi organisasi public seperti penyediaan pelayanan publik.

Pada praktinya, pada Program Pemuda Pelopor oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dimana dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari adanya kegiatan manajemen

dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengarahan, pengendalian dan memanfaatkan SDM yang ada secara maksimal untuk mencapai tujuan tertentu.

1.5.4 Evaluasi

Menurut pandangan Soumelis (1998), evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk membanding bandingkan hal satu dengan yang lain guna untuk mengambil keputusan. Sedangkan Arikunto dan Cepi (2008: 2) berpendapat bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menggali informasi terkait proses kerja suatu program atau kegiatan, yang mana nantinya informasi yang telah didapatkan dimanfaatkan untuk menentukan keputusan.

Selain itu, Djaali dan Pudji (2008: 1) memiliki pendapat bahwasannya evaluasi diartikan sebagai suatu proses menilai suatu program atau kegiatan atas dasar sebuah kriteria dan tujuan dari kegiatan tersebut yang kemudian diikuti oleh pengambilan keputusan terhadap suatu obyek yang dievaluasi.

Evaluasi adalah suatu studi yang dirancang guna untuk mempermudah seseorang atau *audience* dalam menilai suatu objek. Menurut Tipple 1989 Evaluasi biasa digunakan untuk menilai secara spesifik satu bagian tertentu saja, yang mana didalamnya meliputi *monitoring, evaluation, and riview cycle*.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas terkait evaluasi dapat disimpulkan bahwa, evaluasi adalah suatu proses dimana seseorang melakukan penilaian sejauh mana keberhasilan suatu program yang dapat dilihat dari dampak atau hasil yang telah dicapai.

Pada praktiknya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program pemuda pelopor tentunya tidak terlepas dari adanya kegiatan evaluasi guna untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program kepemudaan yang telah dilaksanakan. Serta menjadikan evaluasi sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan suatu program agar pada program selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

1.5.5 Evaluasi Program

Menurut pandangan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), Evaluasi program merupakan suatu upaya yang dilakukan guna untuk mengumpulkan berbagai informasi agar dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan.

Selain itu Suharsimi Arikunto (1993: 297) juga memiliki pandangan yang berbeda terkait evaluasi program. Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 297) evaluasi program adalah suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Apakah kegiatan dilapangan sudah sesuai dengan rencana atau tidak.

Pada praktiknya, Dalam melaksanakan program Pemuda Pelopor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tentunya akan menggunakan evaluasi program sebagai alternatif untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang direncanakan. Dengan adanya evaluasi

program diharapkan dapat menjadi koreksi untuk program selanjutnya agar jauh lebih baik.

1.5.6 Model Evaluasi Program (Model CIPP)

Menurut Madaus, Scriven, Stufflebeam (1993: 118), tujuan penting dari sebuah evaluasi adalah untuk memperbaiki, bukan untuk membuktikan sesuatu. Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi yang biasa disebut CIPP, yaitu: *context*, *input*, *process*, dan *product*.

1) *Context evaluation* (Evaluasi terhadap konteks).

Evaluasi konteks merupakan evaluasi yang bertujuan untuk memberikan alasan yang rasional terkait dalam penentuan tujuan. Evaluasi konteks bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Hal ini berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan.

2) *Input evaluation* (Evaluasi terhadap masukan).

Penilaian yang mencakup pengujian individu tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan sistem pilihan yang harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan suatu program. Bagian penilaian informasi menggabungkan SDM, kantor pendukung dan yayasan seperti halnya teknik dan aturan yang berbeda yang diperlukan.

3) *Process evaluation* (Evaluasi terhadap proses).

Evaluasi proses adalah masalah prosedural dalam pelaksanaan kesempatan dan latihan. Setiap kemajuan yang terjadi dalam latihan diamati dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Stufflebeam juga mengatakan bahwa penilaian adalah pikiran yang terus menerus dari pelaksanaan pengaturan. Penilaian proses juga berencana untuk memberikan data sebagai dasar untuk mengerjakan program seperti merekam, dan mengevaluasi strategi untuk latihan dan acara.

4) *Product evaluation* (Evaluasi terhadap hasil).

Evaluasi hasil adalah penilaian yang diharapkan dapat mengukur, menguraikan, dan mensurvei program. Dalam pemeriksaan butir, diperlukan korelasi antara tujuan yang ditetapkan dalam rencana dan hasil program yang dicapai. Hasilnya adalah tes yang disurvei, tarif, informasi persepsi, grafik informasi, dll, yang dapat diperoleh dengan tujuan yang lebih pasti. Selain itu, pemeriksaan subjektif dilakukan mengapa hasilnya demikian.

CIPP memiliki cara yang komprehensif untuk menangani penilaian, bermaksud untuk memberikan gambaran yang sangat pasti dan luas tentang suatu usaha, dari pengaturannya hingga interaksi pelaksanaannya. CIPP juga dapat bergerak dalam ruang penilaian formatif dan sumatif. Jadi keduanya membantu dengan melakukan peningkatan selama program, seperti memberikan data terakhir.

Peneliti memilih teori CIPPS, karena dalam teori CIPPS itu sudah termasuk target, yang penilaiannya merupakan bagian dari jalannya program gerakan. Dengan demikian, model CIPP merupakan model penilaian yang melihat program sebagai kerangka kerja. Model CIPP tidak hanya dapat dijalankan ketika pengembangan akan atau belum dilakukan, namun model CIPP bagaimanapun dapat diselesaikan meskipun sebuah program telah dibuat.

1.5.7 Kepemudaan

Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan adalah siklus atau tenaga yang dilakukan untuk membangun negara, pemuda adalah kekuatan etis, kontrol sosial dan pemecah masalah yang merupakan contoh dari kapasitas pemuda, tugas pemuda, atribut dan posisinya dalam masyarakat. publik. Dengan adanya undang-undang ini tentunya dapat memberikan jaminan keamanan dan kehadiran pemuda dan olah raga yang sah secara hukum. Selain itu, hadirnya UU ini juga telah memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dan negara-negara sekitarnya agar dapat mengkoordinasikan program-program administrasi kepemudaan.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai aktor dalam mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Pada praktiknya, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rembang mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan salah satunya melalui program pemuda pelopor. Yang mana dalam program ini menjadikan salah satu

bentuk apresiasi bagi pemuda aktif dan berprestasi yang mampu menjadi agen perubahan di Kabupaten Rembang.

1.5.8 Program Pemuda Pelopor

Kepeloporan Pemuda merupakan segenap semangat pemuda dalam mengembangkan potensi dirinya untuk menciptakan terobosan baru dan menjawab tantangan serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan dengan sukarela, tanggung jawab, dan kepedulian yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program pemuda pelopor adalah program penghargaan kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Adanya pelaksanaan program pemuda pelopor ini merupakan suatu bentuk perwujudan kepedulian pemerintah kepada para pemuda yang berprestasi dan menunjukkan kepeloporannya melalui program kerja pemilihan pemuda pelopor.

Program pemuda pelopor diselenggarakan secara berjenjang. Mulai dari tingkat daerah (kota/kabupaten), provinsi, hingga nasional, yang mana puncak pemberian penghargaanannya jatuh pada Peringatan Hari Sumah Pemuda yang dilaksanakan setiap 28 Oktober. Pemilihan pemuda pelopor mencakup lima bidang kepeloporan pemuda yaitu: a)

Pendidikan, b) Agama, c) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, d) Pangan dan e) Inovasi Teknologi.

Pada praktiknya, Dalam melaksanakan program Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang memberikan kebebasan dalam pengajuan pencalonan peserta yang mana pencalonan pemuda pelopor dapat diusulkan oleh masyarakat, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers dan instansi pemerintah SKPD/Kab-Kota setempat melalui camat setempat yang diajukan kepada panitia pemilihan pemuda pelopor Kabupaten Rembang. Penilaian yang dilakukan terhadap calon pemuda pelopor di Kabupaten Rembang berdasarkan seleksi administrasi dan pengamatan lapangan oleh tim penilai. Nantinya akan dipilih 3 calon pemuda pelopor terbaik di bidangnya berdasarkan hasil penilaian juri untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Rembang.

1.5.8.1 Tujuan Program Pemuda Pelopor

Pemerintah melalui program pemuda pelopor Kementrian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan untuk para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan yang telah mampu menunjukkan eksistensi dan semangatnya dalam mengembangkan potensi diri, membuat terobosan baru, dan menjadi pemuda yang solutif. Program pemilihan Pemuda Pelopor memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Mendorong jiwa kepeloporan di kalangan pemuda
- b. Menemukan dan mempersepsikan pemuda yang memiliki potensi sebagai pemuda pelopor
- c. Mengapresiasi kaum muda yang siap membuat terobosan baru, memberikan jawaban atas berbagai persoalan
- d. Pemberian penghargaan kepada pemuda-pemudi yang diputuskan memenuhi kebutuhan dan langkahnya sebagai Pelopor Pemuda Tingkat Nasional

1.5.8.2 Deskripsi Bidang Kepeloporan

1. Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan bidang kepeloporan yang mengelola sumber daya manusia yang baik meliputi: kemajuan, strategi dan model pembelajaran, media dan pendampingan pembelajaran, inovasi pembelajaran, perbaikan dan dewan pelatihan gratis.

Subsektor pendidikan merupakan rintisan pemuda pelopor yang perannya dapat dirasakan langsung oleh daerah setempat, dirasakan dan diapresiasi oleh berbagai asosiasi termasuk pemerintah daerah terdekat sebagai daerah pengajaran.

2. Bidang Agama, Sosial, Budaya

Agama adalah bidang kepeloporan yang berencana untuk menambah bidang ketat dalam kompromi, memahami penjagaan negara dengan bahasa yang ketat dengan menggunakan media inovasi, sebagai perintis dan perekayasa model dakwah imajinatif untuk generasi milenial.

Sosial, lebih tepatnya bidang kepeloporan yang menyoroti penanggulangan bencana, administrasi bantuan sosial pemerintah, tindakan kerelawanan dan dorongan filantropi lainnya.

Kebudayaan adalah bidang kepeloporan yang direncanakan untuk dipertunjukkan dan melalui ekspresi sosial (melalui karya, keahlian, pekerjaan), tradisi adat, sekolah konvensional, dan lain-lain untuk cara hidup negara. Kepeloporan bidang ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesadaran bernegara dan cinta tanah air.

3. Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan, dan Pariwisata

Kepeloporan bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata merupakan bidang kepeloporan dalam memantau kemampuan aset reguler, iklim, dan industri perjalanan melalui latihan yang menyertainya: konservasi, penciptaan, dan promosi mengarah pada penciptaan sumber daya alam dan menciptakan pariwisata yang

bergerak pada ekonomi dan bantuan pemerintah daerah setempat.

4. Bidang Pangan

Kepeloporan di bidang pangan adalah kepeloporan yang berharap untuk mendorong bidang dengan berfokus pada peningkatan nilai guna, pemanfaatan, pengolahan dan penciptaan pangan untuk lebih mengembangkan kesejahteraan pangan dan penilaian yang sehat, mendorong pencapaian ketahanan pangan publik, yang akan mempengaruhi peningkatan ekonomi dan bantuan pemerintah daerah.

5. Inovasi Teknologi

Kepeloporan di bidang kemajuan teknologi adalah usaha pemuda dalam menciptakan, memajukan, meningkatkan dan merancang inovasi di berbagai bidang yang menghasilkan karya asli mereka sendiri (bukan buatan orang lain), yang berarti memberi keuntungan untuk bekerja di bidang ekonomi dan bantuan pemerintah daerah.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah siklus yang berencana untuk mengurangi ide-ide penelitian menjadi bagian-bagian untuk membuatnya lebih mudah dijangkau, dan sederhana untuk diukur. Dengan apa yang dikatakan Sugiyono (2012:31), definisi fungsional adalah atribut yang akan dikonsentrasikan sehingga dapat diperkirakan dengan sangat baik. Definisi tersebut menggambarkan cara tertentu yang akan digunakan untuk memimpin penelitian, sehingga memungkinkan bagi ilmuwan yang berbeda untuk

menduplikasi perkiraan dengan cara yang sama atau mengembangkan cara yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang tentunya dibutuhkan evaluasi program yang berguna sebagai acuan ataupun koreksi agar program pemuda pelopor di tahun selanjutnya dapat lebih baik. Untuk mengevaluasi program pemuda pelopor di Kabupaten Rembang, diperlukan analisis faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Apakah kegiatan dilapangan sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi Program Pemuda Pelopor di Kab.Rembang dalam penelitian ini dapat dilihat dari:

1. Context Evaluation, dapat dilihat dari :
 - a. Perumusan pelaksanaan program pemuda pelopor.
2. Input Evaluation, dapat dilihat dari :
 - a. Kualitas pegawai pelaksana.
 - b. Kualitas SDM peserta pemuda pelopor dalam memahami bidang kepeloporan yang dipilih.
 - c. Sumber daya finansial (dana) yang dalam pelaksanaan program pemuda pelopor.
 - d. Sumber daya fasilitas atau penunjang dalam pelaksanaan pemuda pelopor.

3. Proses Evaluation, dapat dilihat dari :
 - a. Kesesuaian antara rencana dan pengimplementasian program pemuda pelopor.
 - b. Hambatan dalam pelaksanaan program pemuda pelopor.
4. Product Evaluation, dapat dilihat dari :
 - a. Kualitas pemuda di Kabupaten Rembang.
 - b. Kiprah pemuda pelopor dalam pengembangan Kabupaten Rembang.

1.7 Argumen Peneliti

Berdasarkan kajian *literature review* yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang juga menjadi argumen penelitian, yakni:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rita Rahmawati,dkk. (2018) mendeskripsikan implementasi programnya sedangkan peneliti menganalisis evaluasi atas implementasi program.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Saputra (2010). Teori yang digunakan adalah teori kepeloporan dan teori pengembangan program (Harty, Wholey & Newcomer) sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah teori Evaluasi program (Cronbach, Stufflebeam, & Suharsimi Arikunto).
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Esty Purnama Sari (2019). Berfokus pada evaluasi program pengembangan kewirausahaan pemuda di Dindikpora Jambi sedangkan peneliti berfokus pada evaluasi program pemuda pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hasdiansyah dan Yoyon Suryono (2016). Subjek penelitian ini 9 alumni pemuda HMI, sedangkan peneliti menggunakan subjek peserta pemuda pelopor.
- 5) Penelitian yang dilakukan Marc. A. Zimmerman (2017). Berfokus pada evaluasi program berbasis sekolah sedangkan peneliti berfokus pada evaluasi program berbasis kepeloporan pemuda.
- 6) Penelitian yang dilakukan M. Ayik Sugam (2018). Lokus dan cakupannya di desa Jatisaba, sedangkan peneliti lokusnya di Kabupaten Rembang.
- 7) Penelitian yang dilakukan Rani Anggara Berta Yagusta (2017). Keduanya sama – sama mengevaluasi program dari Dindikpora. Namun, penelitian yang dilakukan Rani Anggara Berta Yagusta berfokus pada evaluasi program Gala Desa, sementara peneliti berfokus pada evaluasi program Pemuda Pelopor.

1.8 Metode Penelitian

Metode ilmiah ialah suatu tahapan dan proses ilmiah yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu data tertentu guna untuk melakukan penelitian. Hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan di dalam metode penelitian adalah cara ilmiah, data dan tujuan. Cara ilmiah meliputi kegiatan dalam penelitian yang dilandasi oleh ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Cara-cara atau tahap yang dilakukan harus dapat dilihat dan diamati oleh indera manusia dan tentunya menggunakan langkah-langkah tertentu dalam proses penelitian (Sugiyono, 2016: 2).

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada metode penelitian sering digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan tertentu. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mendapatkan suatu kebenaran melalui suatu model tertentu yang biasa disebut dengan jenis penelitian.

Basrowi (dalam Meleong, 2009:4) menerangkan bahwa Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mana di dalam penelitian tersebut lebih mengutamakan penjelasan dalam bentuk deskripsi yang berupa kata-kata dari seorang informan dan tidak diperoleh dari hasil statistic atau hitungan.

Menurut Husserl (1859-1938) ada beberapa pengertian fenomenologi, khususnya: (1) pengalaman abstrak atau fenomenologis, dan (2) penyelidikan kognisi menurut sudut pandang esensial individu. Hipotesis fenomenologis ini adalah hipotesis yang melihat sesuatu dari pandangan dunia surgawi. Jadi fenomenologi dicirikan sebagai tinjauan yang berupaya menyelidiki secara memukau dan penuh pemikiran hampir semua jenis kesadaran dan pengalaman manusia baik dalam sudut yang nyata, teoretis, moral, berselera, dan ketat. Pada penelitian mengenai Evaluasi Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif-Kualitatif-Fenomenologi. Yang mana pada jenis penelitian ini lebih menekankan analisis dan penjabaran suatu kondisi yang sebenarnya dengan didukung oleh hasil ungkapan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu, sehingga hasil penelitian ini lebih banyak menggunakan kata-kata deskriptif daripada hitungan atau angka. Pada penelitian ini peneliti menggambarkan dan menggali berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang.

1.8.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah adalah tempat atau situs penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan penelitian serta pengamatan bagaimana keberjalanan program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang. Peneliti memilih Kabupaten Rembang karena dalam pelaksanaan program pemuda pelopor di daerah tersebut masih terdapat permasalahan yang perlu diangkat.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi atau informan yang digunakan dalam mencari informasi dalam penelitian. Berikut adalah subyek penelitian yang digunakan oleh peneliti :

Tabel 1 3 Daftar Subyek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Nugroho Septiawan SSTP, M.Ec.Dev	Kepala Seksi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	Vera Lilik Lestari, A.Md	Sekretaris Pelaksana Pemuda Pelopor 2019
3.	Romi Adi	Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Rembang tahun 2019, Juara 2 Pemuda Pelopor Tk. Nasional tahun 2019
4.	Ryxky Bagus Pamungkas	Tokoh Pemuda Kabupaten Rembang
5.	Fichi Rangga Afriansyah	Anggota Organisasi Kepemudaan IMMR Kartini
6.	Raditya Mahendra Putra	Anggota Organisasi Kepemudaan PPI
7.	Rizkia Khoirul Anwar	Anggota Organisasi Kepemudaan Kartini Institute

1.8.4 Jenis Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi dan tindakan dari informan. Sedangkan sumber data lainnya hanya berupa data tambahan seperti dokumen, foto, dan sebagainya. Penelitian ini membagi jenis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Kata-kata dan tindakan

Pada penelitian kualitatif yang menjadi sumber data utama adalah kata dan tindakan yang diambil dari seorang informan. Biasanya sumber data ditulis dalam catatan atau melalui video/audio rekaman.

2. Sumber data tertulis

Tidak hanya sumber data utama yang dijadikan sumber data dalam penelitian kualitatif. Namun juga ada sumber data tertulis yang digunakan sebagai data pendukung. Biasanya sumber data tertulis ini dijadikan sebagai data tambahan yang didapat dari jurnal, web, perpres. Adapun penelitian ini sumber data tertulis yang digunakan oleh penulis adalah jurnal dan dokumen Dindikpora Kabupaten Rembang.

3. Foto

Tidak hanya sumber data utama dan tertulis saja, pada saat ini foto juga digunakan sebagai data pelengkap deskriptif. Dari foto yang digunakan dapat digunakan untuk melihat dari segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

1.8.5 Sumber Data

Seluruh keterangan berkaitan dengan informasi yang dibahas dalam penelitian disebut sebagai sumber data. Di dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang mana data tersebut didapat dari informan atau narasumber secara langsung. Dalam penelitian Evaluasi Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang ialah Kepala seksi kepemudaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Rembang, Panitia Program Pemuda Pelopor di Kabupaten Rembang, Pemuda pelopor Kabupaten Rembang 2019, Tokoh pemuda di Kabupaten Rembang, dan Organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kedua yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data dari jurnal maupun penelitian terdahulu. Data ini hanya bersifat sebagai data pendukung dari keperluan data primer.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2016: 308). Yang menjadi instrument atau alat dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Dalam rangka Pengumpulan data guna mendapatkan data dan informasi terdapat cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan memperoleh informasi, opini, serta alasan untuk topik tertentu dari narasumber sehingga *interviewer* dapat menyimpulkannya. Instrumen yang digunakan disini adalah pedoman wawancara. Dalam wawancara ini peneliti hendak mencari informasi secara lebih mendalam dari narasumber terkait Program Pemuda Pelopor yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

2. Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan seorang peneliti berupaya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan pembahasan penelitian. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal, perpres, dan lain lain.

3. Dokumentasi

Data yang dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk memperkuat bukti dan kesimpulan dari hasil penelitian. Data yang dikumpulkan berupa gambar dan dokumen resmi terkait topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu pengolahan dan penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Tahapan ini merupakan tahapan pengorganisasian data dengan memasukkan ke beberapa kategori dan unit untuk didapati suatu kesimpulan.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 337) menjelaskan secara sistematis analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Kegiatan ini merupakan upaya perangkuman data dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting. Apabila semakin lama seorang peneliti melakukan penelitian di lapangan, hal tersebut menunjukkan

bahwa semakin banyak dan kompleks juga data yang diperoleh. Dengan adanya reduksi data lebih memberikan gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:341) penyajian data dapat dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan Evaluasi Program Pemuda Pelopor di Dindikpora Kabupaten Rembang dengan menggunakan teks naratif. Tidak hanya itu saja, selain menggunakan teks naratif peneliti juga menggunakan gambar ataupun tabel dalam menyajikan data. Penyajian data ini dimaksudkan agar mempermudah dalam pemahaman topik pembahasan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan apabila semua data yang sudah tersaji dan dilakukan pemahaman pada obyek penelitian maka setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam mempertahankan validasi dan realibilitas data seorang peneliti dapat melakukan triangulasi. Lincoln dan Guba (1985) menyatakan bahwa peneliti harus dapat menjamin bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dapat dipercaya yang memenuhi prinsip kredibilitas. Kredibel berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan, serta menginterpretasi data otentik tersebut dengan akurat. Adapun cara yang

dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk mencapai data yang kredibel yaitu dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori, antara lain (Bandur, 2014: 242—243) :

1) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan melalui penggunaan berbagai teknik atau metode untuk menganalisis suatu masalah. Dalam triangulasi teknik, data yang diperoleh dari metode tertentu, akan dicek dengan metode yang lain. Apabila bicara mengenai triangulasi teknik, maka peneliti dianjurkan menggabungkan teknik pengumpulan data yang sekiranya mampu menghasilkan data yang mendalam, yakni wawancara, dan observasi. Selain itu, dengan melakukan penggabungan Teknik pengumpulan data, maka peneliti akan lebih mudah dalam mendapatkan informan yang lebih banyak, sehingga juga mempermudah dalam hal analisis perbandingan.

2) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data penelitian dilakukan melalui penggunaan berbagai sumber data yang beragam dalam penelitian. Hal ini bermakna bahwa dalam penelitian yang kredibel, peneliti kualitatif juga perlu dilengkapi dengan data yang bersumber dari dokumen - dokumen seperti laporan bulanan, tahunan, notulen rapat, catatan lapangan atau jurnal harian peneliti. Dengan kata lain, peneliti tidak hanya membutuhkan data primer atau sekunder saja, melainkan kedua jenis data tersebut. Dengan ini, maka

peneliti dapat membandingkan hasil informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada.

3) Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan melalui penggunaan berbagai perspektif ganda untuk menginterpretasi suatu data. Dalam hal triangulasi teori, peneliti juga perlu memperhatikan triangulasi teori (kerangka teoritis) dan kerangka konseptual yang membantu peneliti untuk mengidentifikasi sub tema dan tema utama penelitian. Semakin banyak peneliti menggunakan dan menganalisis kajian literatur, maka akan semakin mudah peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang ada terkait dalam permasalahan penelitian. Namun, perlu diingat bahwa kajian literatur yang digunakan haruslah merupakan hasil penelitian yang valid, bukan hanya sebatas *stipulative imaginative*. Selain itu, juga menjadi hal penting apabila peneliti menggunakan konsep teoritis yang telah digunakan oleh peneliti lain yang terdahulu dengan topik yang sama, namun fokus dan konteks yang berbeda.